



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/298/2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;

- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;

- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap berbagai tugas yang harus dilaksanakan selama 1 Tahun yaitu Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, sehingga dapat memberikan tuntunan bagi pencapaian sasaran secara efektif dan efisien.

Semoga dengan Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menyusun program dan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat sehingga peran Pemerintah Daerah dapat Mewujudkan Fasilitas Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah di Kalimantan Tengah dapat terlaksana dengan baik.

Palangka Raya, Juli 2023

Pit. KEPALA BIRO,



AHMAD PAHRUKA, S. Pd, M. MP
Pembina
NIP. 197302121999091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 4

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah 5

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD 6

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 7

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 8

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 9

3.3 Program dan Kegiatan 9

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Program dan Kegiatan 13

BAB V PENUTUP 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Setiap tahunnya Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dirangkum dalam suatu rencana kerja, dan rencana kerja itu sendiri merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) Tahun

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar Tingkat Pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam Pembangunan Daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Perumusan Program dan Kegiatan
- 4.1 Target Kinerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, 1). evaluasi pelaksanaan Renja & perkiraan capaian tahun berjalan, 2). pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program 3). kegiatan pelaksanaan, dan cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja.

➤ Tabel 2.1 Terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Guna menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah seyogyanya menggunakan indikator dan target masing-masing jenis pelayanan SPM yang akan dicapai pada Tahun 2024.

➤ Tabel 2.2 Terlampir

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Biro Kesejahteraan Rakyat s/d Tahun 2022
Sekretariat Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	12
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96%	94%	94%	94,0%	100%	96%	96%	100%	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro	5	5	5	5	100%	5	5	100%	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	3	3	3	100%	4	4	100%	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	100%	4	4	100%	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	100%	5	5	100%	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Biro	5	5	5	5	100%	5	5	100%	
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	3	3	3	100%	3	3	100%	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro	2	2	2	2	100%	2	2	100%	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	2	2	100%	2	2	100%	

4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Biro	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Adm. Kepegawaian	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	5	5	5	5	5	5	5	100%	5	5	100%
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek	5	5	5	5	5	5	5	100%	5	5	100%
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Biro	12	12	12	12	12	12	12	100%	12	12	100%
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	3	3	3	3	3	3	100%	3	3	100%
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	2	2	2	2	2	2	100%	2	2	100%
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	-	-	-	-	-	5	-	5	5	100%
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	12	12	12	100%	12	12	100%
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%
4.01.01.1.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	2	2	2	2	2	2	100%	2	2	100%
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	2	2	2	2	2	2	100%	2	2	100%
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	11	11	11	11	11	11	11	100%	11	11	100%
4.01.04.1.01	Fasilitas Pembinaan mental Spiritual	Jumlah Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	5	5	5	5	5	5	5	100%	5	5	100%
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Spiritual yang dikelola	300	300	300	300	300	300	300	100%	300	300	100%
4.01.04.1.01.02	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Kelembagaan Bina Spiritual yang difasilitasi	200	200	200	200	200	200	200	100%	200	200	100%
4.01.04.1.02	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	3	3	3	3	3	3	3	100%	3	3	100%

4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	100%	2	2	100%
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3	3	3	3	3	3	3	100%	3	3	100%
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2	2	2	2	2	2	2	100%	2	2	100%
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Agar pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu diupayakan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis.
2. Penyediaan dana melalui APBD yang memadai guna menjaga jaringan dengan mengupayakan peningkatan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2.3.2 Tantangan dan Peluang Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tantangan :

a. Sumber Daya Manusia :

Menghadapi teknologi informasi yang semakin cepat dan global, diperlukan Sumber Daya Manusia yang siap pakai, terampil dan profesional di bidangnya. Untuk itu sangat dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai/staf melalui pendidikan dan pelatihan .

b. Sarana dan prasarana :

- 1) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu disediakan kendaraan dinas jabatan untuk Pratama, Administrasi dan Fungsional sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penambahan Peralatan Kantor, Komputer, Laptop, Printer, AC dan Rehab Ruangan, serta ruang rapat yang memadai.

Peluang :

Kesinambungan penyediaan dana melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunjang berbagai program kegiatan operasional, dengan diupayakan peningkatan dana dan penajaman prioritas program.

2.4 Review Terhadap RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

➤ Tabel 2.4 Terlampir

Tabel 2.4
Review Terhadap RKPD Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng.

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikatif (Rp)	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.315.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.315.000.000		
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi				575.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi				575.000.000		
1	Penyusunan Dolumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dolumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	25.000.000		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	25.000.000		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	25.000.000		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	2 Laporan	500.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	2 Laporan	500.000.000		
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				75.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				75.000.000		
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	2 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	2 Dokumen	25.000.000		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	25.000.000		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	25.000.000		
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				50.000.000		
1	Penatausahaan BMD pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	2 Laporan	50.000.000	Penatausahaan BMD pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	2 Laporan	50.000.000		
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.000.000		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000		

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	10 orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	10 orang	100.000.000	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	10 orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	10 orang	50.000.000	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.600.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.600.000.000	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket	575.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket	575.000.000	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	25.000.000	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	1.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	1.000.000.000	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			840.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			840.000.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat	1 Laporan	5.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	1 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	1 Laporan	50.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 Laporan	250.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	535.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	535.000.000	
8	Program Kesejahteraan Rakyat			153.894.446.638	Program Kesejahteraan Rakyat			153.894.446.638	
I	Facilitasi Pembinaan Mental Spiritual			151.994.446.638	Facilitasi Pembinaan Mental Spiritual			151.994.446.638	
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang dikelola	400 Unit	151.294.446.638	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang dikelola	400 Unit	151.294.446.638	
2	Facilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	300 Lembaga	700.000.000	Facilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	300 Lembaga	700.000.000	
II	Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			850.000.000	Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			850.000.000	
1	Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	250.000.000	Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	250.000.000	

2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	350.000.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	350.000.000	
3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	250.000.000	
III	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			1.050.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			1.050.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	1 Dokumen	250.000.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	550.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	550.000.000	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Perhubungan	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Perhubungan	1 Dokumen	250.000.000	
JUMLAH				157.209.446.638				157.209.446.638	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditunjukkan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
A.	Program Kesejahteraan Rakyat				
1.	Pembinaan Pondok Pesantren dan Madrasah	Palangka Raya		500.000.000	
2.	Rapat Koordinasi Destinasi Kebudayaan dan Pariwisata	Palangka Raya		100.000.000	
3.	Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Se- Kalimantan Tengah	14 Kab/Kota se- Kalteng		200.000.000	
4.	Penguatan Kelembagaan Perempuan (DWP)	Palangka Raya		250.000.000	
5.	Rapat Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya		200.000.000	
6.	Pelaksanaan Test Urine terhadap ASN Lingkup Setda	Palangka Raya		150.000.000	
7.	Peningkatan Pelayanan PMI	Palangka Raya		100.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, di Pasal 24 disebutkan Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020.

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

- Terwujudnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah.

3.2.2 Sasaran

- Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

VISI :

" KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH "
(BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, DAN HARMONIS)

MISI :

Dalam mewujudkan visi Kalimantan Tengah Makin Berkah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

- ✓ Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- ✓ Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industri tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- ✓ Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- ✓ Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (ecotourism) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- ✓ Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;
- ✓ Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;
- ✓ Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industri kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- ✓ Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;
- ✓ Memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jembatan, jalan, jalur kereta api, bandara internasional, dan pelabuhan laut.

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

- ✓ Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;
- ✓ Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- ✓ Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- ✓ Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- ✓ Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usah, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global;
- ✓ Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan lokal.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

- ✓ Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (smart government);

- ✓ Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
- ✓ Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;
- ✓ Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan public;
- ✓ Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

- ✓ Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- ✓ Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- ✓ Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- ✓ Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional;

- ✓ Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa.

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

- ✓ Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan local Huma Baetang (Rumah Besar);
- ✓ Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- ✓ Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- ✓ Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat public yang berorientasi kesetaraan gender;
- ✓ Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2024. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2023 disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Biro.
2. Pencapaian kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Berdasarkan faktor-faktor diatas perumusan/perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
 - b. Penyusunan Dolumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**
 - a. Penatausahaan BMD pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

B. Program Kesejahteraan Rakyat

1. Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

- a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spriritual
- b. Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual

2. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

- a. Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
- b. Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
- c. Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan

3. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 bahwa Perangkat Daerah menelaah dan memverifikasi terhadap usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Biro Kesejahteraan Rakyat telah melakukan telaah dan verifikasi terhadap usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan/direncanakan untuk tahun anggaran 2024 terdiri dari 2 Program dengan 9 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 157.209.446.638,-** untuk lebih jelasnya rincian Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 serta besaran pendanaannya dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini.

Tabel Terlampir :

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		1.00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		25.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	175.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	175.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		25.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.600.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	1.600.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	575.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		575.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		25.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		1.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			-	840.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	840.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.00 Laporan	5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		5.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1.00 Laporan	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2.00 Laporan	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	535.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		535.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	153.894.446.638,00						-	1.900.000.000,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	-			-	151.994.446.638,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				200 Unit	151.294.446.638,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1.00 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			J U M L A H					157.209.446.638,00							5.190.000.001,00		

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dan Pembangunan di Kalimantan Tengah untuk menuju Kalteng Maju, Mandiri & Adil Untuk Kesejahteraan segenap Masyarakat Menuju Kalteng Makin Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Dan Harmonis) .

Palangka Raya, Juli 2023

Plt. KEPALA BIRO,



AHMAD PAHRUKA, S. Pd, M. MP
Pembina
NIP. 197302121999091001